



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupataen Poso

Yunruth Marande ^{a, 1*}, Abd. Malik Saleh ^{b, 2}

¹ Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintang Maroso, Poso,

² Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintang Maroso, Poso

*ruthmarande@gmail.com; amasjhiposo@gmail.com

*korespondensi penulis ² amasjhiposo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-02-2022

Disetujui: 04-03-2022

Kata Kunci:

Pemberdayaan, BUMDes

Keywords:

Empowerment, BUMDes

ABSTRAK

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pengembangan ekonomi desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Betalemba menggunakan tiga pendekatan yaitu: a. Upaya Itu Harus Terarah, Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di desa Betalemba diawali dengan sosialisasi, tujuannya adalah agar setiap masyarakat dapat mengetahui program BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang masyarakat bermusyawarah bersama untuk menjelaskan visi dan misi BUMDes serta memperkenalkan ke enam jenis usaha yang di kelola oleh BUMDes yaitu usaha wifi, molen cor, pompa pasir, garandong, catering, dan mebel serta menjelaskan keuntungan hadirnya BUMDes Sintangwulemba. b. Penyertaan Modal dari pemerintah desa Betalemba sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). c. Dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran melalui pendekatan kelompok yaitu adanya kerjasama antara pihak BUMDes dan masyarakat karena program BUMDes tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan di desa Betalemba yaitu; Faktor Pendukung adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan Faktor penghambat tidak adanya Sarana dan Prasarana BUMDes (komputer dan kantor BUMDes) dan Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memakai barang-barang yang disewakan oleh BUMDes agar dapat dipakai dalam jangka panjang.

Abstract: Community empowerment is one of the efforts to improve community welfare, community empowerment activities include village economic development. Village Community Empowerment through Village Owned Enterprises (BUMDES) In Betalemba Village, three approaches are used, namely: a. The effort must be directed, implementing community empowerment in Betalemba village begins with socialization, the goal is that every community can know the BUMDes program. The socialization was carried out by inviting the community to hold deliberations together to explain the vision and mission of BUMDes as well as introducing the six types of businesses managed by BUMDes, namely wifi business, cast molen, sand pump, garandong, catering, and furniture as well as explaining the advantages of the presence of BUMDes Sintangwulemba. b. Capital participation from the Betalemba village government is Rp. 175,000,000 (one hundred and seventy five million rupiah). c. It is carried out by the targeted community through a group approach, namely the existence of cooperation between the BUMDes and the community because the BUMDes program will not run well if there is no collaboration with the community. The factors that influence empowerment in Betalemba village are; Supporting factors for community participation or participation in the management of Village Owned Enterprises (BUMDes). While the inhibiting factors are the absence of BUMDes facilities and infrastructure (computers and BUMDes offices) and the lack of public awareness in using goods rented by BUMDes so that they can be used in the long term.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain pengembangan ekonomi desa. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep paling manjur hasilnya dapat berlangsung lama. Issue kemiskinanpun cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2012:39)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah perusahaan milik pemerintah desa yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan di kelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapat asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran yang dikelola oleh BUMDes tersebut (Surya;2015).

Adanya BUMDES diharapkan akan terjadi pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat. Maka dalam hal ini BUMDes memiliki peran penting bagi masyarakat desa. Salah satu program yang ada didalamnya upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan pemberdayaan tertuang dalam BumDes yakni BUMDes Betalemba.

Pemberdayaan masyarakat melalui BUMdes yang ada di desa Betalemba telah dikelola kedalam 6 (enam) jenis usaha milik desa yaitu

1. Pengelolaan wifi desa, untuk mempercepat informasi dan komunikasi BUMDES desa Betalemba telah melakukan pengelolaan wifi desa dalam 3 (tiga) titik hotspot yang di beri kode hotspot 1,2,3 pengelolaan ini adalah pelayanan jual voucher 5.000 dengan masa berlaku selama 12 jam aktif selama 24 jam. Voucher 2.000 masa berlaku 4 jam aktif selama 12 jam. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ini adalah putus kabel sampai memakan waktu selama 2 minggu karena disambar petir yang tentunya berdampak pada pendapatan BUMDES yang kadang tidak mencapai setoran yang harus dibayar pada pengelola wifi Rp. 2.000.000 setiap bulannya.
2. Pengelolaan Garandong. Garandong digunakan untuk mengangkut pasir dari sungai Puna ke masyarakat yang membutuhkan pasir dengan harga Rp 60.000/ret.
3. Pompa Pasir dioperasikan di sepanjang aliran sungai Puna, saat ini tidak digunakan karena tidak ada tempat untuk sedot pasir karena sungai Puna sering banjir yang mengakibatkan aliran sungai berpindah.
4. Pengelolaan Catering ini dikelola oleh ibu PKK dalam bentuk sewa piring dan juga menerima Catering makanan untuk pesta dan sebagainya.
5. Pengelolaan Molen Cor
6. Mebel.

Diharapkan keberadaan beberapa usaha yang dikelola warga masyarakat melalui BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokok. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Penelitian pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDES didesa Betalemba merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan menggunakan teori Sumodiningrat (1999:32) menjelaskan bahwa dalam memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama yaitu upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan menggunakan pendekatan kelompok.

a. Upaya Itu Harus Terarah.

Tujuan pendekatan upaya harus terarah yakni untuk meningkatkan upaya pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Untuk meningkatkan ekonomi suatu desa maka pemerintah desa membentuk suatu program yang dikelola oleh pemerintah desa maupun masyarakat agar program yang dikelola tersebut bermanfaat bagi perkembangan desa dan masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mengembangkan usaha BUMDes Sintuwu Lemba desa Betalemba, seperti di sampaikan oleh Sekretaris BUMDes Bapak IR, mengatakan:

“Upaya yang kami lakukan pada masyarakat adalah sosialisasi kepada masyarakat desa Betalemba mengenai visi dan misi BUMDes, jenis-jenis usaha BUMDes yang dikelola kedalam 5 (lima) jenis usaha milik desa yaitu pengelolaan wifi desa, usaha catering, usaha angkutan grandong, usaha mebel dan usaha mesin pompa pasir. Diharapkan keberadaan beberapa usaha yang dikelola warga masyarakat melalui BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Wawancara tanggal, 23 Agustus 2021)

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Desa Betalemba ibu LFL mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan usaha yang dikelola oleh BUMDes kepada masyarakat mengatakan bahwa:

“Upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi tentang BUMDes, dan kepala desa lama bapak YN telah mengundang masyarakat desa Betalemba seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Termasuk pengurus Karang taruna telah disampaikan bahwa usaha BUMDes di desa Betalemba dapat di dimanfaatkan sesuai kebutuhan misalnya jika ada yang pesta dapat menggunakan jasa catering desa yang merupakan usaha dari BUMDes kita, tidak perlu lagi memakai jasa dari luar kampung Betalemba, demikian pula jasa angkutan grandong dan dapat menggunakan wifi desa untuk memperkenalkan produk makanan dan sebagainya lewat media sosial serta pembayaran jika menggunakan beberapa jasa BUMDes Sintuwulemba milik desa Betalemba (Wawancara tanggal, 23 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa program BUMDes yang dikelola oleh pengurus BUMDes sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat desa dan mengundang masyarakat bermusyawarah bersama untuk menjelaskan visi dan misi BUMDes Sintuwu Lemba serta memperkenalkan keunggulan dari sistem penjualan dan pembayaran di BUMDes tersebut.

b. Penyertaan Modal Desa

Besarnya dana penyertaan modal dari pemerintah desa Betalemba adalah sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka penggunaannya dapat diatur sebagai berikut :

1. Biaya operasional sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu)
2. Biaya penguatan kelembagaan BUMDes sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Biaya sarana dan prasarana BUMDes sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Untuk pengembangan usaha BUMDes sebesar Rp. 161.200.000 (Seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Pengelolaan BUMDes agar bisa berjalan dengan baik, dapat dikelola sebagaimana pendapat masyarakat Bapak JT bahwa:

“sosialisasi BUMDes sudah cukup lumayan dan semua orang sudah tau keberadaan BUMDes, kecuali bagi masyarakat kalangan orang tua agak lambat menerima informasi karena kegiatan para orang tua lebih banyak di kebun atau di sungai Puna mengumpulkan batu untuk dijual, itupun dengan adanya jaringan internet orang lebih mudah menjual batu melalui telepon atau media sosial” (Wawancara tanggal, 06 September 2021).

Berdasarkan wawancara diatas pengelolaan BUMDes agar bisa berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat desa dan dari sosialisasi tersebut masyarakat desa mengetahui keuntungan menggunakan beberapa jasa usaha BUMDes. Demikian pula dengan menggunakan jasa catering masyarakat tidak perlu repot-repot untuk meminjam alat masak dari rumah ke rumah warga masyarakat dalam jumlah banyak seperti yang dibiasakan orang jika ada pesta, semuanya telah tersedia di BUMDes. Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa masyarakat salah satunya ibu VW, yang mengatakan bahwa:

“keberadaan BUMDes ini menurut saya sudah cukup membantu masyarakat sekitar, karena tidak perlu jauh-jauh harus ke kota untuk belanja bahan makananan untuk pesta karena sudah ada catering BUMDes yang dikelola oleh ibu-ibu PKK dapat dimanfaatkan, demikian pula dengan pemilik pesta tidak harus disibukkan dengan urusan menyediakan menu bagi tamu-tamu yang datang semuanya telah disiapkan oleh ibu PKK (Wawancara tanggal 06 September 2021).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat dengan adanya beberapa usaha milik BUMDes merasa sangat terbantu khususnya usaha catering tidak perlu repot-repot mengurus makanan untuk pesta bahkan repot-repot pinjam alat masak dari luar Betalemba.

c. Dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran

Pemberdayaan masyarakat melalui beberapa unit usaha BUMDes Sintuwu Lembu menunjukkan masyarakat sudah ikut serta dalam membangun dan mengembangkan potensi desa yang telah dikelola. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak IR selaku Sekretaris BUMDes Betalemba, beliau mengatakan bahwa:

“sebagian masyarakat disini baik di dusun 1 maupun di dusun II sudah ikut serta dalam pelaksanaan BUMDes, seperti penggunaan jasa wifi desa menggunakan 3 (tiga) titik, kemudian menggunakan jasa angkutan grandong untuk keperluan angkutan pasir dari sungai Puna dan sebagainya, sewa jasa Catering baik itu sewa piring dan alat masak lainnya atau sekaligus dengan jasa masak, yang melibatkan masyarakat yang punya ketrampilan juga dibidang usaha mebel, dan usaha pompa pasir dengan demikian masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan usaha BUMDes dan secara mudah mendapatkan pelayanan secara cepat dibandingkan sebelum ada usaha BUMDes (Wawancara tanggal, 22 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Betalemba bapak IR diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Betalemba sebagian sudah ikut serta dalam pengelolaan BUMDes

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Desa Betalemba LFL, yang mengatakan:

“masyarakat sudah ikut serta, kita lihat dari beberapa postingan masyarakat menjual apa saja baik itu makanan dan menjual kue-kue dll semuanya di jual melalui media sosial tidak seperti dulu harus menjual makanan jalan kaki dari rumah ke rumah untuk menjajahkan makan. Bagi ibu-ibu rumah tangga dapat menambah penghasilan setiap sore jualan kue di media sosial, hal ini lebih cepat habis dibandingkan dengan menjual secara konvensional, selain itu ibu-ibu dapat membuat kue dan olahan lainnya berdasarkan pesanan saja, tidak ada rasa ragu-ragu jika tidak laku karena semuanya di buat berdasarkan pesanan. Dengan adanya wifi desa dengan harga lebih murah dibandingkan harga

penggunaan paket data masyarakat dapat memberi informasi apa saja yang mendatang uang. (Wawancara tanggal, 27 September 2021)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Betalemba rata-rata telah menggunakan internet dan vouchernya dapat dibeli di BUMDes yang terletak di 3 (tiga) titik yang telah di tentukan pengurus BUMDes untuk mengembangkan usahanya, hal ini dapat dilihat di akun-akun media sosial mereka dan sekarang mereka sadar bahwa lebih efektif dan lebih murah menawarkan barang dagangan entah itu kue, sayur dan lauk masak, buah-buahan dan lain-lain di media sosial dibandingkan membawah ke pasar atau menjajahkan keliling kampung.

Adapun pendapat yang tidak jauh beda disampaikan oleh ibu YT, mengatakan bahwa:

“saya hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi kalau ada pesta di kampung ini saya di panggil ikut membantu kegiatan catering ibu PKK, dengan cara ini saya kan sudah ikut serta dalam kegiatan BUMDes khususnya pengelolaan catering milik BUMDes desa” (Wawancara tanggal, 30 September 2021)

Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan ibu IT, yang mengatakan bahwa:

“saya ibu rumah tangga biasa tidak ada hubungannya ke urusan BUMDes paling sebatas pembeli vocher pulsa di 3 (tiga) titik yang telah ditentukan pengurus BUMDes, kalau pengelola dan pengurus BUMDes jelas pasti ikut semua kegiatan-kegiatan BUMDes, kan mereka yang mengelolah dan mereka pengurusnya.” (Wawancara tanggal, 02 Oktober 2021).

Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu NA merupakan masyarakat yang ikut memanfaatkan jaringan Wifi BUMDes mengatakan bahwa:

“Saya bersyukur dengan adanya wifi BUMDes saya dapat manfaat banyak menjual kue setiap pagi dan sore melalui media sosial. Puji Tuhan dengan adanya wifi BUMDes dengan mudah saya menjual kue dan apa saja melalui media sosial dan tidak perlu repot-repot keliling kampung cukup tinggal di rumah sambil melihat hand phone berapa pesanan orang, kemudian diantar dialamat masing-masing dan sudah pasti dibayar.” (Wawancara tanggal, 08 Oktober 2021).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah ikut serta dalam pengelolaan dan memanfaatkan BUMDes desa Betalemba.

d. Melalui pendekatan kelompok

Dalam pendekatan ini yang dimaksud adalah masalah keterbelakangan sosial yang terjadi pada masyarakat desa sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, tanpa bantuan dari pihak lain untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa mereka tidak akan bisa melakukannya secara sendiri-sendiri, karena lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Untuk itu pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara pihak lain dengan BUMDes agar dapat mensejahterakan masyarakat desa dan mengembangkan usaha BUMDes. Informan ibu MA berpendapat bahwa:

“kerjasama dengan masyarakat so pasti ada, karena BUMDes mengelola wifi memakai 3 (tiga) titik penjualan voucher tentunya membutuhkan tenaga kerja yaitu diambil dari masyarat desa Betalemba, 2 orang di dusun 1 dan 1 orang di dusun 2 lorong Purnama. Begitu pula pengelolaan catering melibatkan beberapa orang ibu PKK yang siap melayani pesanan di pesta baik itu ulang tahun, pesta pernikahan dan acara ucapan syukur (Wawancara, tanggal 15 Oktober 2021).

Salah satu kegiatan ibu-ibu PKK dalam mengelola catering mengangkut peralatan masak dari baruga tempat penyimpanan peralatan masak ke tempat pesta seperti yang disampaikan oleh ibu MA dapat dilihat dalam gambar berikut:

Selanjutnya ibu MA menambahkan bahwa:

“Kalau kerjasama dengan pihak lain sejauh ini torang belum ada, selama ini torang masih kerjasama dengan masyarakat yang ada didalam kampung, masih banyak pemuda-pemudi yang bisa dipangge kerja, entahlah kalau kedepan barangkali moada atau tidak yang jelas untuk sekarang ini belum ada kerjasama dengan orang luar kampung”. (Wawancara, tanggal 22 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat ditarik disimpulkan bahwa sangat pentingnya kerjasama antara pihak BUMDes dan masyarakat karena program BUMDes tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Betalemba terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung didalam pengelolaan BUMDes ini menurut sudut pandang dari salah satu informan ialah dari kemauan atau partisipasi masyarakat sehingga sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian desa. Berikut hasil wawancara dengan bapak RL salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau di Betalemba ini partisipasi atau keikutsertaan masyakat sangat tinggi, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari misalnya di dalam kampung ada pesta ataupun duka masyarakat segera membantu orang yang membuat pesta ataupun membantu orang yang sedang ditimpa duka. Demikian juga dalam kegiatan BUMDes masyarakat dengan cepat dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut”. (Wawancara, tanggal 30 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RL tersebut diatas, yang menjadi faktor pendukung didalam pengelolaan BUMDes di desa Betalemba adalah adanya keikutsertaan masyarakat yang membantu dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan BUMDes.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, Sarana dan prasarana untuk BUMDes sebagai berikut.

1. Sarana dan Prasarana BUMDes.

Pengelola atau pengurus dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes merasa rumit dan terkendala karena tidak ada sarana dan prasarana terkhusus untuk BUMDes. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pengurus BUMDes desa Betalemba bapak HS mengatakan bahwa:

“Sebagai pengurus BUMDes tentu banyak tugas dan kewajiban yang harus kami kerjakan salah satunya adalah membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya komputer dan kantor BUMDes menghambat kinerja kami sehingga pengelolaan BUMDes tidak berjalan dengan baik (Wawancara, tanggal 8 Nopember 2021).

Demikian juga dengan tanggapan ibu IB selaku masyarakat pengguna manfaat BUMDes mengatakan bahwa:

“selama ini saya melihat pengelolaan administrasi BUMDes masih menggunakan pengelolaan manual padahal jaman sekarang semua telah menggunakan teknologi, akibatnya pencarian data BUMDes terkesan lama”.

(Wawancara ibu IB, 11 Nopember 2021).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui faktor penghambat adalah tidak adanya sarana dan prasarana berupa computer dan kantor BUMDes sehingga dapat menghambat jalannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Betalemba

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terhadap barang pinjaman milik BUMDes dan tidak bertanggung jawab terkait dengan penggunaan barang-barang BUMDes. Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa bantuan apapun dari pemerintah semua berhak menggunakannya tanpa memikirkan keberlangsungan bantuan pemerintah dapat digunakan dalam jangka Panjang Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu LL berikut:

“Molen cor sudah lama tidak beroperasi karena rusak, disewa orang kemudian dalam pemakaian terjadi kerusakan sodi kase pulang tanpa diperbaiki. Jadi sekarang so taparkir lama tidak bisa dipake. Orang yang pinjam pikir ini bantuan pemerintah umum punya semua bisa pake, kalau rusak nanti diperbaiki pakai uang pemerintah. Kesadaran untuk bisa bertanggung jawab terhadap peminjaman Molen Cor tidak ada sama sekali” (Wawancara, tanggal 13 Nopember 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, kesadaran beberapa orang terhadap barang-barang pinjaman milik BUMDes sangat rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Betalemba menggunakan tiga pendekatan yaitu:

a. Upaya Itu Harus Terarah, Pelaksanakan Pemberdayaan masyarakat di desa Betalemba diawali dengan sosialisasi, tujuannya adalah agar setiap masyarakat dapat mengetahui program BUMDes. b. Penyertaan Modal Desa, Besarnya dana dari pemerintah desa Betalemba sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). c. Dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran melalui pendekatan kelompok yaitu adanya kerjasama antara pihak BUMDes dan masyarakat karena program BUMDes tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan di desa Betalemba di pengaruhi dua faktor yaitu; Faktor Pendukung yaitu adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat yaitu pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan Faktor penghambat yaitu Tidak adanya Sarana dan Prasarana BUMDes berupa komputer dan kantor BUMDes serta Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memakai barang-barang yang disewakan oleh BUMDes agar dapat dipakai dalam jangka panjang.

Saran

- a. Untuk keberlangsungan usaha BUMDes perlu terus menerus mengingatkan warga masyarakat bahwa barang-barang milik BUMDes harus dirawat dengan baik agar dapat di manfaatkan dalam jangka panjang
- b. Penyediaan sarana dan prasarana BUMDes yaitu pengadaan komputer dan kantor BUMDes untuk menunjang pengelolaan BUMDes terutama untuk tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh Sulistiani. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Yogyakarta, Gala Media.
- Chambers, Robert. 1994. *Participatory Rural Appraisal (PRA): Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam: Yayasan Mitra Tani.
- HAW. Widjaja, 2004. Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta
- Kartasasmita, Ginjar. 1996. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

- Mardikamto. Totok, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Sadu Warsito, M. Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Subejo. 2013. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Bunga Rampai*
Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Jakarta: Alfabeta.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Putra. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif desa*. Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Papilaya, Eddy Ch. 2001. *Wacana Pembangunan Alternative*. Yogyakarta: Sr-Ruzz Madia.
- Prijono & Pranaka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.
- Rukminto, Isbandi. 2008. *Perencanaan Partisi Patoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: Gudang Ilmu

Jurnal:

- Fitria, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ekonomi, Adi Islamic Economic, Volume 1 No. 1 2020.
<https://www.neliti.com/id/publications/318662/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-melalui-badan-usaha-milik-desa-bumdes>
- Nirwati, Muhammad Amir, Jopang , *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara*, Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, Volume 10, No. 2 Tahun 2019.
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/download/10605/7447>
- Abdul Wahid Al Mubarraq Hamka, Irwanti Said, Sakaruddin M. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terapung*, Jurnal Washiyah, Volume 1. No. 2 2020
<https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/14558>

Dokumen:

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP No. 11 tahun 2021 tentang BUMDes.
- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Permendes PDT dan Trans No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDES.